

Tak Tahan Dihina dan Diancam, Bodyguard Erdogan Bunuh Diri

ANKARA(IM)- Seorang petugas keamanan yang bekerja di unit perlindungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah melakukan bunuh diri. Bodyguard presiden itu meninggalkan catatan yang mengatakan bahwa dia telah menghadapi penghinaan dan ancaman lantaran pekerjaannya.

Surat kabar Cumhuriyet mengidentifikasi bodyguard Erdogan yang bunuh diri bernama Mehmet Ali Bulut. Kematian-nya diputuskan sebagai bunuh diri setelah rekan-rekannya menemukan catatan ketika mereka menemukan jasad korban di apartemennya setelah dia tidak muncul di tempat kerja dan teleponnya dimatikan.

"Saya berharap Anda telah memperlakukan karyawan Anda dengan baik dan menantikan kabar mereka. Pasti yang terbaik adalah yang Anda lakukan untuk menghina personel Anda, mengancam mereka, memecat mereka, memperma-

lukan mereka dan menjadikan mereka pembohong," tulis Bulut dalam catatan bunuh dirinya, yang diterjemahkan surat kabar Ahal, Kamis (18/3).

"Setiap orang memiliki harga dirinya, dan saya tidak tahan dengan kata-kata itu," kata Bulut.

Bulut sekarang menjadi petugas ketiga yang melakukan bunuh diri tahun ini, setelah dua petugas lainnya yang diidentifikasi sebagai Halil Akkaya dan Ethem Dagdeviren bunuh diri awal tahun ini.

"Anak-anak ini, pada puncak kehidupan mereka, ingin menjadi petugas polisi, dan kemudian mereka bunuh diri. Apa yang mendorong mereka untuk menyerah pada hidup mereka sendiri?," tulis Ahal mengutip Murat Bakan, wakil dari oposisi utama Partai Rakyat Republik yang mengajukan penyelidikan ke parlemen setelah kasus bunuh diri para petugas tersebut. ● gul



IDN/ANTARA

PENCARI SUAKA DARI GUATEMALA

Marvin (kiri) dan Brando, keduanya balita berusia satu tahun pencari suaka dari Guatemala, melihar dari gondongan bayi setelah melewati sungai Rio Grande dengan ibu mereka menuju Amerika Serikat dari Meksiko menggunakan rakit, di Penitas, Texas, Amerika Serikat, Rabu (17/3/2021).

Demonstran Yaman Serbu Istana Kepresidenan di Aden

Demonstran memprotes tindakan Yaman yang didukung Internasional di Aden

ADEN(IM)- Ratusan demonstran Yaman menyerbu Istana Kepresidenan di kota pelabuhan selatan Aden. Demonstran memprotes kondisi kehidupan yang buruk dan korupsi dalam pemerintahan Presiden Yaman Abdrabbuh Mansur Hadi yang diakui secara internasional. Menurut seorang koresponden AFP, para pengunjung

rasa termasuk purnawirawan militer dan personel keamanan. Mereka akhirnya didorong mundur dengan damai, saat para pejabat pemerintah termasuk Perdana Menteri Maec Abdulmalik Saeed masih di dalam gedung.

Seorang pejabat pemerintah mengatakan pasukan Yaman dan Saudi mengawal para anggota kabinet, termasuk

Saeed, ke gedung intelijen militer di dalam kompleks istana. Pada Desember tahun lalu, menjelang kedatangan pemerintah baru yang dibentuk dari Arab Saudi, purnawirawan militer wilayah selatan mengancam akan mengambil kendali istana karena gaji mereka belum dibayar.

Ketika anggota pemerintahan baru mendarat di Bandara Aden dalam penerbangan dari Riyadh pada bulan yang sama, bandara tersebut terkena tiga serangan bom yang menewaskan 25 orang. Tidak ada pejabat pemerintah yang terluka atau tewas.

Pemerintah menuduh gerakan Houthi melakukan serangan tersebut, meskipun hal ini dibantah juru bicara Houthi Mohammed Al-Bukhaiti. Dia menyalahkan Arab Saudi, yang mendukung pemerintahan Hadi melawan Dewan Transisi Selatan (STC) separatis yang didukung UEA, yang masih menguasai sebagian besar provinsi Aden dan sebelumnya merebut kota dan Istana Kepresidenan pada 2019.

Menurut Al Jazeera, demonstrasi terpisahkan terjadi di kota Sayoun di timur Yaman, provinsi Hadhramout, di mana puluhan orang menyerbu kom-

pleks pemerintah. Demonstran memprotes kondisi hidup yang mengirikan dan kenaikan harga yang terus menerus.

Kantor Pers Yaman, melaporkan demonstrasi menentang pemerintah Hadi juga terjadi di provinsi selatan Abyan setelah jatuhnya mata uang lokal yang ilegal.

Pengunjuk rasa juga mengancam kondisi ekonomi yang memburuk dan kenaikan harga pangan. Demonstran dilaporkan meneriakkan pengunduran diri pemerintah dan Gubernur Provinsi, Abu Bakr Hussein. ● tom

Kota Yangon Bagai Medan Perang, 200 Orang Lebih Tewas

YANGON(IM)- Gumpalan asap membubung pada Rabu (17/3) malam di atas Yangon, kota terbesar Myanmar setelah junta militer memberlakukan darurat militer. Kota itu sudah berubah menjadi medan perang, di mana pasukan keamanan menembaki pengunjung rasa antikudeta tak bersenjata yang berliming di balik barikade yang terbakar.

Penduduk yang mengalami trauma telah melarikan diri dari lingkungan industri di Yangon yang telah menjadi salah satu situs titik nyala dalam pemberontakan nasional melawan kudeta militer hampir tujuh minggu lalu. Junta semakin mengerahkan kekuatan yang lebih besar untuk meredam demonstrasi, dengan lebih dari 200 pengunjung rasa dilaporkan tewas dalam tindakan keras tersebut.

Hari Minggu lalu adalah hari paling mematikan sejak kudeta 1 Februari, di mana kelompok pemantau lokal mendokumentasikan lebih dari 70 orang tewas. Sebagian besar dari mereka tewas di kota industri Hlaing Tharyar di Yangon yang telah menjadi zona pertempuran.

Mereka juga mendirikan barikade yang terbuat dari ban, kayu, karung pasir dan tiang bambu. Beberapa dari barikade itu dibakar, menyebabkan asap hitam tebal membubung di atas jalan-jalan yang sebagian besar sepi. Beberapa pengunjung rasa melampirkan bom bensin ke pasukan keamanan, tetapi sebaliknya tampak tidak berdaya saat mereka bersembunyi di balik perisai darurat.

Di daerah pemukiman di kota tetangga, rekaman video yang diverifikasi oleh AFP menunjukkan ada tembakan tanpa henti selama sekitar 15 detik. Informasi tentang penangkapan dan kekerasan telah mengalir keluar dari daerah konflik di media sosial dalam melambat karena pembatasan data seluler oleh junta.

Sebagian besar warga Myanmar belum dapat menggunakan internet seluler mereka sejak Senin dini hari. Negara ini juga diberlakukan penutupan internet setiap malam selama delapan jam.

Lebih dari 200 orang tewas dalam kerusuhan antikudeta, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik—sebuah kelompok pemantau lokal. Tetapi pengunjung rasa terus turun ke jalan pada hari Rabu, di mana media lokal menyiarkan gambar orang-orang yang berbaris melalui Hpikant utara dan wilayah Sagaing tengah.

Di kota terbesar kedua di negara itu, Mandalay, para biksu berjubah jingga berbaris bersama para demonstran yang membawa bendera merah partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD)—partainya Aung San Suu Kyi. NLD inilah partai pemenang pemilu November 2020 yang kemudian dikudeta junta militer pada 1 Februari 2021.

PBB pada hari Selasa kembali mengutuk kematian di Myanmar, dan menambahkan bahwa pihaknya khawatir tentang laporan penyiakasan dan kematian mereka yang ditahan.

"Jumlah korban tewas melonjak selama sepekan terakhir di Myanmar, di mana pasukan keamanan telah menggunakan kekuatan mematikan secara agresif terhadap pengunjung rasa damai," kata juru bicara kantor HAM PBB Ravina Shamdasani kepada wartawan.

"Laporan penyiakasan yang sangat menyedihkan di dalam tahanan juga telah muncul."

Kantor tersebut telah menetapkan bahwa setidaknya lima kematian dalam tahanan telah terjadi dalam beberapa pekan terakhir. "Setidaknya dua tubuh korban telah menunjukkan tanda-tanda penganiayaan fisik yang parah yang menunjukkan bahwa mereka disiksa," ujarnya. ● gul

Biden Sebut Putin Pembunuh, Rusia Tarik Dubesnya dari AS

MOSKOW(IM) - Pemerintah Rusia menarik pulang duta besar (dubes)-nya yang ditempatkan di Amerika Serikat (AS) sehari setelah ketegangan diplomatik kedua negara memanas. Perseteruan ini dipicu pernyataan Presiden Amerika Joe Biden yang menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai "pembunuh" yang "tidak mempunyai jiwa".

Dalam wawancara dengan ABC News, Presiden Amerika mengatakan Moskow akan segera membayar harga atas dugaan ikut campur dalam pemilihan presiden (pilpres) AS sebagaimana yang dilaporkan intelijen Amerika. Biden ditanyai tentang laporan intelijen AS bahwa Putin mencoba merugikan pencalonannya dalam pilpres November 2020 dan mempromosikan Donald Trump. "Dia akan membayar harganya," kata Biden. "Anda akan segera melihat."

Tak lama kemudian, Departemen Perdagangan AS mengumumkan sanksi berupa pengetatan pembatasan ekspor yang diberlakukan di Rusia awal bulan ini sebagai hukuman atas serangan racun terhadap pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny.

Ditanya apakah menurutnya Putin, yang telah dituduh memerintahkan meracuni Navalny serta lawan politik lainnya, adalah "pembunuh", Biden menjawab: "Saya bersedia [mengatakannya]." Pewawancara ABC News, George Stephanopoulos, juga mengingatkan Biden bahwa dia pernah mengatakan kepada Putin bahwa pemimpin Kremlin itu "tidak memiliki jiwa". "Saya memang mengatakan itu padanya, ya. Dan tanggapannya adalah, 'Kami memahami satu sama lain,'" tegas Biden.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengonfirmasi bahwa Duta Besar Rusia untuk AS, Anatoly Antonov, telah dipanggil pulang ke Moskow untuk berdiskusi secara langsung tentang hubungan negara yang sedang berlangsung dengan Washington dan juga dengan pemerintahan Joe Biden.

Dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan penarikan diplomat pada Rabu malam, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan, "Duta besar itu diperlukan di Moskow untuk konsultasi guna menganalisis apa yang harus dilakukan dan

ke mana harus menuju dalam konteks hubungan dengan AS." "Perwakilan Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait lainnya akan berpartisipasi dalam diskusi dengan Antonov tentang hubungan AS ke depan," katanya, seperti dikutip Russia Today.

"Bagi kami, penting untuk menentukan kemungkinan cara untuk meluruskan hubungan Rusia-Amerika, yang tetap berada dalam kondisi sulit setelah secara efektif dibawa ke jalan buntu oleh Washington dalam beberapa tahun terakhir," paparnya.

"Moskow tertarik untuk menghindari degradasi yang tidak dapat diubah dari hubungannya dengan Washington," lanjut Zakharova, yang mengungkapkan harapan bahwa pejabat Biden juga memahami risiko dari skenario semacam itu.

Wakil Menteri Luar Negeri Sergey Ryabkov mengatakan Moskow tenang tentang sanksi baru dari AS, karena tindakan seperti itu telah diambil berkali-kali sebelumnya. Namun, dia menunjukkan bahwa langkah seperti itu oleh Washington mengurangi kemungkinan "normalisasi hubungan" antara pihak-pihak tersebut. ● ans

Bank Dunia, UE, PBB Beri Lampu Hijau Beri Bantuan Lebanon

BEIRUT(IM) - Rakyat miskin di Lebanon akan segera menerima lebih banyak bantuan dari donor internasional. Hal itu diklaim setelah Kementerian Keuangan Lebanon mendapatkan surat dari pendonor internasional tentang kesepakatan penyaluran bantuan dalam tarif yang ditetapkan oleh Bank Sentral pada Rabu (17/3) waktu setempat.

Dalam sepektuk surat kepada kementerian keuangan negara yang dilihat oleh Thomson Reuters Foundation, perwakilan dari Uni Eropa (UE), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Bank Dunia mengatakan, telah mencatat perjanjian lisan pada 22 Februari oleh kepala Bank Sentral dan wakil perdana menteri untuk bantuan

akan dicairkan dalam dolar AS. Kami yakin Anda berbagi urgensi untuk meluncurkan mekanisme pencairan yang telah disepakati secepatnya, untuk memastikan konsistensi dan kontinuitas bantuan di tengah kondisi sosial-ekonomi yang semakin menantang," kata surat itu seperti dikutip laman Middle East Monitor, Kamis (18/3).

Lebanon tercatat sebagai salah satu negara dengan distribusi kekayaan yang paling tidak merata di dunia. Kemiskinan telah melonjak sejak krisis ekonomi meletus pada 2019, diperburuk oleh ledakan pada Agustus yang membuat pelabuhan dan kawasan bisnis pusat kota Beirut menjadi reruntuhan hingga pandemi Covid-19.

Dalam protes terhadap pemerintahan, para pengunjung rasa membakar ban dan memblokir jalan di Beirut pada Selasa lalu. Hal itu meningkatkan kekhawatiran akan kerusuhan yang lebih luas di negara yang jatuh akibat melonjaknya pengangguran dan inflasi, pandemi Covid-19, dan krisis keuangan yang berakar pada puluhan tahun limbah negara dan korupsi.

Kira-kira setengah dari angkatan kerja bergantung pada upah harian yang sebagian besar dibayar dalam mata uang lokal. Sebuah studi baru-baru ini oleh organisasi bantuan CARE menemukan bahwa 94 persen penduduk Lebanon berpenghasilan di bawah upah minimum. ● tom



IDN/ANTARA

RUU SERTIFIKAT VAKSINASI COVID-19 UNI EROPA

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengangkat tangan saat konferensi pers setelah pertemuan dengan anggota komisi untuk mengesalkan ruu mengenai sertifikat vaksinasi COVID-19 umum Uni Eropa (UE) di kantor pusat UE di Brussel, Belgia, Rabu (17/3).

Demonstran Bobol Penjara dan Bebaskan Polisi yang Ditahan

PORT-AU-PRINCE(IM) - Pengunjuk rasa Haiti membebaskan empat orang polisi dari balik penjara. Unjuk rasa yang memasuki hari kelima ini pecah buntut penggerebekan polisi yang gagal ke markas sebuah kelompok kriminal dan kemarahan pada pihak berwenang.

Kelompok-kelompok kriminal berkuasa dengan menguasai sejumlah wilayah di ibu kota dan membuat kota-kota lain menjadi daerah rawan kejahatan.

Pada Kamis (18/4), kelompok Fantom 509 mengatakan mereka yakin polisi-polisi yang mendekam di kantor polisi Port-au-Prince itu ditahan secara tidak adil. Anggota kelompok yang bertopeng dan bersenjata itu, mengaku mantan polisi dan tentara.

Polisi tidak menanggapi permintaan komentar mengenai insiden tersebut dan mengapa para petugas polisi itu ditahan. Melalui sebuah pernyataan pengacara, para polisi tersebut mengatakan mereka korban dari politisasi kepolisian Haiti dan kegagalan sistem peradilan.

Anggota-anggota Fantom 509 mengatakan mereka juga memprotes fakta pihak berwenang yang tidak menemukan empat jenazah polisi tewas dalam

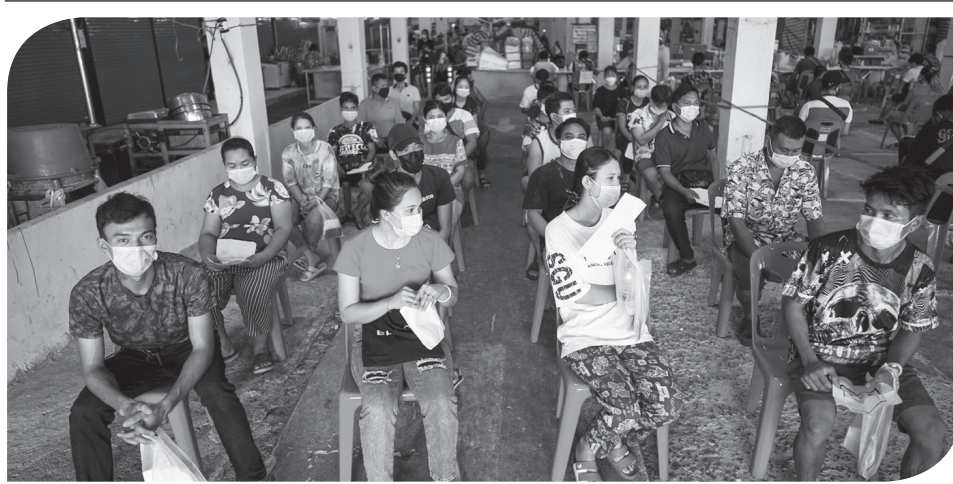
penyerbuan Jumat (12/3) lalu. Para calon polisi yang masih dalam pelatihan juga terlibat dalam pembobolan penjara. Sementara warga memblokir jalan dengan mobil, puing-puing dan ban yang dibakar serta merusak dealer mobil.

Deklarasi darurat
Pada Rabu (17/3) kemarin Presiden Jovenel Moise mendeklarasikan darurat militer di wilayah yang dikuasai kelompok kriminal selama satu bulan. Tujuannya agar pihak berwenang dapat mengambil alih kembali situasi.

Kritikus menuduh pemerintah tidak cukup membekali polisi dengan peralatan yang cukup untuk menghadapi kelompok kriminal. Pemerintah hanya menaikkan sedikit anggaran untuk kepolisian tahun ini.

Kritikus juga menuduh kelompok-kelompok kriminal tersebut memang sengaja dipelihara untuk mengintimidasi oposisi atau muncul sendiri karena ketidakmampuan pemerintah.

Pihak berwenang Haiti belum menangkap ketua kelompok kriminal dan pejabat pemerintah sebelumnya yang terlibat dalam pembantaian ke markas oposisi. ● gul



IDN/ANTARA

VAKSINASI COVID-19 DI BANGKOK - THAILAND

Orang-orang menunggu untuk menerima vaksin penyakit virus corona Sino-vac (COVID-19) di pasar setelah ratusan penduduk lokal di distrik tersebut dinyatakan positif COVID-19 di Bangkok, Thailand, Rabu (17/3).